KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : Kunker fiktif rugikan negara RP 945 Miliar
**Tanggal** : Jumat, 13 Mei 2016
**Surat Kabar** : Indo Pos
**Halaman** : 6

KONTRADIKSI

# Kunker Fiktif Rugikan Negara Rp 945 Miliar

JAKARTA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan kunjungan kerja (kunker) fiktif anggota DPR RI. Potensi kerugian negara dari dugaan kunker fiktif itu mencapai Rp 945 miliar lebih.

Dugaan kunker fiktif ini terungkap dari inisiatif yang dilakukan Fraksi PDIP DPR. PDIP meminta anggotanya membuat laporan hasil kunker dan kunjungan di masa reses.

"BPK melakukan audit terhadap DPR, lalu menemukan sejumlah kekurangan terkait kunjungan kerja anggota legislatif," kata Wakil Ketua Fraksi PDIP DPR Hendrawan Supratikno kepada wartawan, kemarin (12/5).

Dugaan kunker fiktif ini berlaku untuk seluruh fraksi, bukan hanya PDIP. Namun, kata Hendrawan, PDIP berinisiatif untuk menagih laporan kunker anggotanya.

Dia menjelaskan, PDIP mendapat informasi adanya potensi kerugian negara itu dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR soal hasil audit BPK itu.

Dalam suratnya kepada fraksi-fraksi DPR, Setjen DPR menginformasikan tentang diragukannya keterjadian kunker anggota DPR dalam melaksanakan tugasnya setahun terakhir ini, sehingga potensi kerugian negara mencapai Rp 945.465.000.000.

PDIP lalu berinisiatif menagih laporan kerja anggota fraksinya. Setiap anggota, setelah melakukan kunjungan, baik itu kunjungan reses ataupun ke luar negeri, wajib menyetorkan laporan secara mendetail disertai bukti-bukti kunjungan.

Anggota komisi XI DPR ini pun mengakui, sejumlah anggota DPR selama ini banyak yang kurang serius membuat laporan pertanggungjawaban kunjungan ke dapilnya.

Ada pula anggota DPR yang hanya memercayakan kegiatan kunker kepada tenaga ahli.

Alhasil, foto kegiatan yang sama digunakan berkali-kali dalam setiap laporan kunker.

"Jadi artinya, aktivitas anggota dewan itu menurut audit BPK tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keuangan," bebernya menambahkan. **(dil)**